



Pengaruh Konotasi Negatif Akronim Aplikasi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Persepsi Publik: Studi Kasus 11 Aplikasi Pemerintah Indonesia

(*The Influence of Negative Connotations of Government Applications and Its Implications on Public Perceptions: Case Study Of 11 Indonesian Government Applications*)

Nur Lailatul Aqromi¹⁾, Siti Khodijah²⁾, Nina Hayuningtyas³⁾

¹Fakultas Teknologi dan Desain, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Surel: lyla@asia.ac.id

²Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Surel: sitikhodijah@uinkhas.ac.id

³Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Surel: ninahayuningtyas@uinkhas.ac.id

DOI: [10.23917/cls.v9i2.6445](https://doi.org/10.23917/cls.v9i2.6445)

Diterima: 26 Agustus 2024. Revisi: 7 Oktober 2024. Disetujui: 8 Oktober 2024

Tersedia secara elektronik: 28 Desember 2024. Terbit: 28 Desember 2024

Sifat:

N. L. Aqromi, "Pengaruh Konotasi Negatif Akronim Aplikasi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Persepsi Publik: Studi Kasus 11 Aplikasi Pemerintah Indonesia," *J. Kaji. Linguist. dan Sastra*, vol. 9, no. 2, pp. 237-252, 2024, doi: DOI: 10.23917/cls.v9i2.6445.

Abstract

This study aims to investigate the impact of negative connotations in acronyms used by 11 Indonesian government applications. The research focuses on understanding public perception of these acronyms, especially those with vulgar and sexist connotations. The methodology includes a combination of observation and survey methods. Primary data were collected by recording acronyms from official government websites, while secondary data were obtained through a questionnaire survey with 60 respondents (38 females and 22 males). The results show that 52.4% of respondents are aware of these acronyms, and over 90% perceive them as vulgar. Moreover, more than half of the respondents find these acronyms inappropriate for public services, with 52.4% associating them with gender-specific sexual connotations. The study highlights the need for a more culturally sensitive approach in branding public services to avoid alienating the public.

Keywords: Acronyms, gender sensitivity, government applications, negative connotations, public perception

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh konotasi negatif dalam akronim yang

Penulis Korespondensi: Nur Lailatul Aqromi

Lailatul Aqromi, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Surel: Lyla@asia.ac.id

digunakan oleh 11 aplikasi milik pemerintah Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman persepsi publik terhadap akronim-akronim tersebut, terutama yang memiliki konotasi vulgar dan seksual. Metodologi yang digunakan meliputi kombinasi metode observasi dan survei. Data primer dikumpulkan melalui pencatatan akronim dari situs resmi pemerintah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui survei kuesioner dengan 60 responden (38 perempuan dan 22 laki-laki). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52,4% responden mengetahui akronim-akronim ini, dan lebih dari 90% menganggapnya vulgar. Selain itu, lebih dari separuh responden merasa bahwa akronim-akronim ini tidak pantas untuk layanan publik, dengan 52,4% mengasosiasikannya dengan konotasi seksual yang spesifik terhadap jenis kelamin tertentu. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih sensitif secara budaya dalam penamaan layanan publik untuk menghindari alienasi dari masyarakat.

Keywords: akronim, aplikasi pemerintah, persepsi publik, konotasi negatif, sensitivitas gender

Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi pendorong utama dalam transformasi layanan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik melalui pengembangan berbagai aplikasi pemerintah. Namun, di tengah kemajuan ini, muncul kontroversi terkait penggunaan akronim sebagai nama aplikasi, yang memicu perdebatan di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengaruh konotasi negatif dalam akronim yang digunakan oleh 11 aplikasi milik pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal persepsi publik terhadap nama-nama tersebut yang dianggap memiliki makna vulgar dan seksual.

Penggunaan akronim dalam branding, terutama pada aplikasi pemerintah, memiliki dampak signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan merespons layanan yang disediakan. Akronim, sebagai singkatan dari nama yang panjang, bertujuan untuk memudahkan pengucapan dan memori. Namun, akronim juga sering kali membawa makna konotatif yang dapat menimbulkan asosiasi negatif, melampaui definisi literalnya. Sebagai contoh, akronim "NEET" (Not in Education, Employment, or Training) sering dikritik karena dianggap menstigmatisasi individu muda sebagai kegagalan, tanpa mempertimbangkan hambatan sistemik yang mereka hadapi [1]. Demikian pula, akronim "PIIGS" yang merujuk pada Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol, dianggap memperkuat stereotip negatif tentang ketidakstabilan ekonomi negara-negara tersebut [2].

Dalam konteks Indonesia, penggunaan akronim kontroversial oleh pemerintah telah menjadi sorotan [3]. Meski dimaksudkan untuk mempermudah pengucapan dan daya ingat, akronim-akronim ini sering dianggap vulgar, tidak layak, dan seksis oleh masyarakat, terutama terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur terkait dampak konotasi negatif dari akronim-akronim ini terhadap persepsi publik. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa akronim pada nama aplikasi pemerintah memiliki konotasi negatif yang mempengaruhi persepsi masyarakat secara negatif.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menilai akronim-akronim ini sebagai vulgar, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akronim dengan konotasi negatif dapat menciptakan stigma dan menghambat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut [4]. Masyarakat juga menilai akronim-akronim ini tidak layak digunakan sebagai nama untuk aplikasi layanan publik, menunjukkan adanya ketidakcocokan antara niat pemerintah dan persepsi publik yang melihatnya sebagai tidak pantas dan merendahkan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa akronim-akronim tersebut memperkuat stereotip negatif di masyarakat. Konotasi negatif ini sering kali dikaitkan dengan makna vulgar dan seksis, yang memperkuat bias gender dalam bahasa. Dalam konteks branding, penggunaan bahasa yang seksis dapat memperkuat persepsi negatif terhadap perempuan dan berkontribusi pada ketidaksetaraan gender [5]. Hal ini tercermin dalam penilaian masyarakat terhadap akronim-akronim aplikasi pemerintah yang dinilai seksis atau mengandung muatan seksual terhadap gender tertentu, terutama perempuan.

Namun, temuan lain menunjukkan bahwa akronim-akronim ini tetap digunakan oleh pemerintah karena kemudahan pengucapan dan daya ingat yang tinggi. Fenomena ini konsisten dengan konsep "brand vulgarity" dalam branding sektor publik, di mana strategi branding yang kontroversial dapat menciptakan citra yang mudah dikenali meskipun berisiko menyinggung segmen tertentu dan merusak kredibilitas institusi publik [6].

Dari sudut pandang sosiolinguistik, penelitian ini mengkaji hubungan antara

gender dan bahasa dalam konteks akronim yang vulgar. Sosiolinguistik mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeda dan bagaimana bahasa mencerminkan hubungan sosial dalam suatu komunitas [7]. Penggunaan akronim dengan konotasi negatif sering kali mencerminkan dominasi maskulinitas dalam bahasa, yang menciptakan kekerasan simbolik terhadap gender yang terdominasi [8].

Keseluruhan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat pemerintah dalam mempromosikan layanan publik melalui branding yang efektif dengan persepsi masyarakat yang merasa teralienasi oleh pilihan nama yang dianggap vulgar dan seksis. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya dalam pemilihan nama aplikasi. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang inklusif dan tidak diskriminatif dalam branding layanan publik agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa menimbulkan persepsi negatif.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana akronim dalam nama aplikasi pemerintah dapat mempengaruhi persepsi publik terkait isu vulgaritas, kelayakan, dan seksisme. Temuan ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih hati-hati dan responsif dalam branding layanan publik, di mana bahasa yang digunakan harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi masyarakat.

Metode

Data primer dalam penelitian ini adalah 11 Akronim Aplikasi Pemerintah dan data sekunder penelitian ini adalah hasil dari survei berupa kuesioner tentang pemahaman Akronim Aplikasi milik Pemerintah yang disebar melalui Google Form. Dari hasil survei diperoleh total 60 Responden yang terdiri atas 38 responden Perempuan dan 22 responden laki-laki. Adapun sebaran usia dari responden adalah dari 18-46 Tahun. Metode penelitian dibagi dalam tiga tahap, yakni tahap pengambilan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Dalam pengambilan data, metode yang digunakan ialah metode simak dan survei. Teknik dasar dari metode simak yang digunakan ialah teknik catat [9]. Teknik catat digunakan untuk mencatat akronim

aplikasi Pemerintah yang ditemukan di laman resmi milik Pemerintah. Metode survei digunakan untuk memperkuat analisis data primer. Survei memberikan pertanyaan terkait apakah responden (perwakilan masyarakat) mengetahui 11 Akronim Aplikasi Pemerintah dan pertanyaan lain terkait persepsi responden terhadap makna konotasi 11 Akronim Aplikasi Pemerintah. Hasil survei memuat 60 responden (22 laki-laki dan 38 perempuan) yang secara otomatis data disajikan melalui bagan presentase. Dalam menganalisis, cara yang digunakan adalah menguraikan akronim menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, menganalisis makna denotasi atau makna literal Akronim, dan menganalisis perubahan makna dari bentuk asli dan bentuk yang sudah menjadi akronim (Makna konotasi),. Metode yang digunakan dalam menyajikan hasil analisis ialah metode informal, yakni bersifat deskriptif dengan menguraikan fakta yang ada dan metode formal, yakni menampilkan diagram berupa presentase.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Lingual Akronim Aplikasi

Dari 11 total data Akronim Aplikasi milik Pemerintah yang telah dikumpulkan didapatkan hasil bahwa terdapat proses pembentukan Akronim yang berbeda-beda dan cenderung bersifat arbitrary. Data Akronim Aplikasi Pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1 Data Akronim Aplikasi Pemerintah di bawah ini.

Tabel 1 Data Akronim Aplikasi Pemerintah

Data	Akronim Aplikasi Pemerintah	Kepanjangan
1	SIBEPEK	Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan
2	SITHOLE	Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online
3	SISKA KU INTIP	Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sawi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti - Plasma
4	SIMONTOK	Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok
5	SISEMOK	Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Kawula Muda
6	SICANTIK	Sistem Pencatatan Kehadiran & Kinerja.
7	SIGANTENG	Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah
8	SIPEDO	Sistem Pelatihan Berbasis Data Online

9	MAS DEDI MEMANG JANTAN	Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan.
10	i-Pubers	Integrasi Pupuk Bersubsidi
11	JEBOL YA MAS	Jemput Bola Layani Masyarakat

Data 1 ‘Sipepek’

Proses pembentukan Akronim pada Data 1 Sipepek menggunakan rangkaian fonem pertama setiap unsur dengan pelepasan konjungsi, akan tetapi tidak semua fonem pertama digunakan. Dalam akronim Sipepek dapat ditemukan bahwa hanya terdapat 2 fonem [p] sedangkan pada versi lengkapnya terdapat tiga fonem [p] yakni untuk Leksem Pelayanan, Program dan Penanggulangan.

Data 2 ‘Sithole’

Akronim tersebut dibentuk dari rangkaian fonem pertama setiap unsur, akan tetapi dalam pembentukannya terdapat unsur arbitrary karena untuk kata Konsultasi yang diambil sebagai akronim adalah fonem [t] yang berada ditengah kata, dan untuk leksem terakhir yakni Online diambil 3 fonem yakni [o], [l] dan [e]. Pengambilan unsur fonem yang acak pada leksem dimaksudkan untuk memudahkan pelafalan akronim.

Data 3 ‘Siska Ku Intip’

Proses pembentukan akronim terdiri atas rangkaian unsur fonem pertama dan suku kata yang sulit dirumuskan, rangkaian fonem dapat ditemukan pada penggunaan [s] (Sistem), [i] (Intergrasi), [k] (Kelapa), [k] (Kemitraan), [u] (Usaha), empat fonem /inti/ (Inti), [p] (Plasma) dan suku kata lain yang tidak bisa dirumuskan (Sawit-Sawi,Berbasis). Dari proses pembentukannya dapat disimpulkan bahwa akronim tersebut lebih bertujuan mencari bentuk akronim yang praktis sehingga lebih mudah dibaca dan diingat oleh Masyarakat.

Data 4 ‘Simontok’

Proses pembentukan akronim tersebut berasal dari rangkaian dua fonem dari suku awal pertama yakni /si/ (Sistem), tiga fonem /mon/(Monitoring), dan suku kata yang sulit dirumuskan (Kebutuhan Pangan Pokok). Proses pembentukan akronim bersifat arbitrary karena lebih mengutamakan hasil akronim berupa leksem yang sudah umum di Masyarakat sehingga menjadi lebih mudah diingat.

Data 5 ‘SISEMOK’

Proses pemebentukan akronim rangkaian huruf pertama setiap unsur suku kata yang hanya berlaku untuk [s] (Sistem) [i] (Informasi) dan untuk SEMOK merupakan pembentukan akronim yang sulit dirumuskan karena memakai unsur huruf atau fonem acak dari kata Organisasi Kemasyarakatan Kawula Muda.

Data 6’ SICANTIK’

Proses pembentukan akronim SICANTIK dari rangakaian dua fonem dari suku awal pertama yakni /si/ (Sistem) dan unsur fonem dalam kata yakni [c],[a],[n] (Pencatatan), Unsur huruf dalam kata yakni [i] (Kehadiran) dan [k] (Kinerja). Akronim SICANTIK merupakan bentuk akronim berupa kata yang dikenal baik oleh Masyarakat sehingga memudahkan Masyarakat untuk mengingatnya.

Data 7 ‘SIGANTENG’

Proses pembentukan akronim SIGANTENG dari rangkaian fonem pertama setiap unsur suku kata yang sulit dirumuskan atau bersifat arbitrary. Akronim mengutamakan unsur kemudahan Masyarakat dalam mengingat karena kata GANTENG merupakan kata yang ada dalam Bahasa Indonesia dan dipakai secara umum oleh Masyarakat.

Data 8 ‘SIPEDO’

Proses pembentukan akronim SIPEDO dari rangakaian dua fonem dari suku awal pertama yakni /si/ (Sistem),/pe/ (Pelatihan) dan unsur fonem pertama dalam leksem yakni [d] (Data) dan [o] (online). Akronim SIPEDO membentuk sebuah kata yang cukup mudah diingat oleh Masyarakat.

Data 9 ‘MAS DEDI MEMANG JANTAN’

Proses pembentukan akronim MAS DEDI MEMANG JANTAN berasal dari rangkaian fonem pertama setiap unsur suku kata yang sulit dirumuskan, karena bersifat acak seperti 3 fonem unsur kata pertama pada /mas/ (Masyarakat) dan /mem/ dan /ang/ (Memperhatikan Angkatan), 4 fonem ditangah leksem yakni /dedi/ (Berededikasi), fonem pada akhir kata seperti pada /ja/ dan /ntan/ (Kerja Rentan).

Data 10 ‘i-Pubers’

Proses pembentukan akronim didapatkan dari unsur fonem pertama leksem yakni [i] (Intergrasi), rangkaian 2 fonem awal suku pertama yakni /pu/ (Pupuk) dengan tiga

fonem awal suku kedua yakni /bers/ (Bersubsidi).

Data 11 ‘JEBOL YA MAS’

Merupakan akronim dari Jemput Bola Layani Masyarakat, pembentukan akronim dari rangkaian fonem awal suku pertama yakni /je/ (Jemput), /bol/ (Bola), /mas/ (Masyarakat) dan rangkaian fonem tengah suku kata yakni /ya/ (Layani).

Dari proses pembentukan akronim dapat terlihat adanya pola arbitrary dalam setiap akronim yang ada, proses pembentukan Akronim lebih mengutamakan unsur pelafalan kemudahan untuk diingat oleh Masyarakat, sehingga akronim yang dipilih menggunakan kata yang sudah familier di kalangan Masyarakat.

2. Persepsi Publik Terkait Implikasi Makna Akronim

Akronim membantu dalam penyederhanaan informasi yang kompleks. Makna denotatif dari akronim terkait langsung dengan tujuannya untuk mengkomunikasikan konsep yang lebih luas dengan singkat [10]. Lebih lanjut lagi, manusia cenderung mencari relevansi maksimal dalam komunikasi. Dalam konteks ini, akronim dengan makna denotatif yang jelas dan langsung dianggap lebih efektif dalam berkomunikasi karena relevansinya mudah dipahami [11]. Definisi literal atau makna Denotatif pada Akronim Aplikasi dapat dilihat dari tujuan aplikasi tersebut. Adapun makna denotatif pada Tabel 2 Makna Literal (Denotatif) Akronim Aplikasi Pemerintah sebagai berikut.

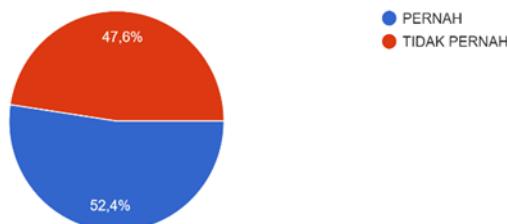
Tabel 2 Data Makna Literal (Denotatif) Akronim Aplikasi Pemerintah

Data	Akronim Aplikasi Pemerintah	Kepanjangan
1	SIBEPEK	Aplikasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga kurang mampu yang berada di Kawasan Kabupaten Cirebon.
2	SITHOLE	Aplikasi yang memberikan layanan konsultasi hukum gratis bagi Masyarakat.
3	SISKA KU INTIP	Aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi potong, pendapatan pekebun dan peternak, serta melestarikan lingkunga di Provinsi Kalimantan Selatan.
4	SIMONTOK	Aplikasi yang digunakan untuk memonitoring jumlah stok dan kebutuhan pangan pokok di wilayah Surakarta
5	SISEMOK	Aplikasi yang dibuat oleh Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk memberikan layanan pengajuan partai politik, ormas, dan yayasan di wilayah tersebut.
6	SICANTIK	Aplikasi yang dikembangkan Kabupaten Bogor

7	SIGANTENG	untuk mencatat kehadiran dan kinerja ASN di wilayah kerja Kabupaten Bogor.
8	SIPEDO	Platform yang ditujukan untuk pengajuan izin ESDM di Provinsi Jawa Tengah.
9	MAS DEDI MEMANG JANTAN	Program milik Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk mempermudah fungsi pelatihan di Balai Pelatihan Kerja
10	i-Pubers	Program yang diusung oleh Kota Tegal dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
11	JEBOL YA MAS	Program hasil kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bertujuan untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para Petani.
		Program untuk melayani warga yang sakit dan tidak bisa datang ke puskesmas untuk bisa dijemput tim puskesmas dari Puskesmas Anggut Atas Kota Bengkulu.

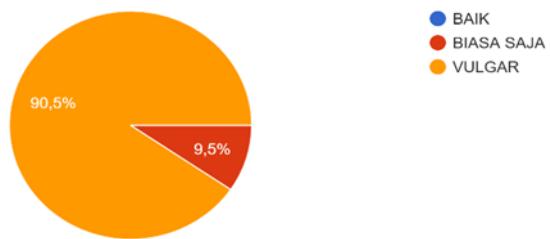
Selain makna literal (denotatif) dari penggunaan akronim aplikasi pemerintah, penggunaan akronim tersebut juga menimbulkan makna konotasi baik yang memiliki asosiasi positif maupun negatif. Makna Konotatif muncul karena adanya perbedaan persepsi atau rasa pada kata yang muncul, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan norma masyarakat [12].

Makna konotasi yang muncul sebagai persepsi dari masyarakat dapat dilihat dari hasil respon kuesioner yang dibagikan kepada responden berjumlah 60 Orang yang terdiri atas 38 responden wanita dan 22 responden laki-laki dengan sebaran usia 18-46 Tahun. Dari pertanyaan apakah responden pernah mendengar atau mengetahui 11 akronim aplikasi pemerintah 47,6% responden menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar dan sebanyak 52,4 % menyatakan pernah mendengar atau mengetahui 11 akronim aplikasi pemerintah. Untuk Gambaran persentase dapat terlihat pada Gambar 1 Persentase Pernah atau Tidak Pernah Mendengar 11 Akronim Aplikasi Pemerintah.

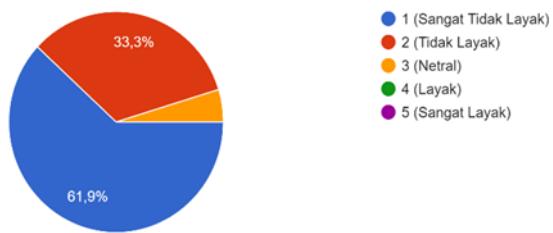


Gambar 1 Persentase Pernah atau Tidak Pernah Mendengar 11 Akronim Aplikasi Pemerintah

Kesan pertama yang didapatkan oleh Responden Ketika mendengar atau mengetahu 11 Akronim Aplikasi Pemerintah menyatakan bahwa lebih dari 90% atau mayoritas responden menyatakan bahwa Akronim tersebut vulgar dan hanya sebagain kecil saja yang menilai kesan dari Akronim tersebut biasa saja (Gambar 2). Lebih dari 50% Responden juga menilai bahwa Akronim dari 11 Aplikasi milik Pemerintah dinilai tidak layak dipakai sebagai Akronim Aplikasi dengan tujuan untuk Pelayanan Masyarakat (Gambar 3).

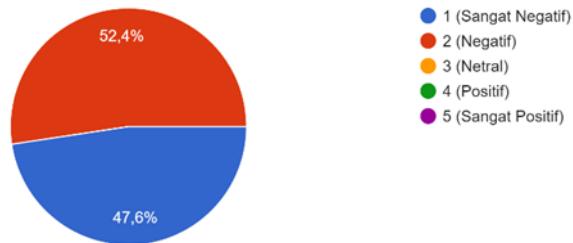


Gambar 2 Persentase Kesan Terhadap 11 Akronim Aplikasi Pemerintah



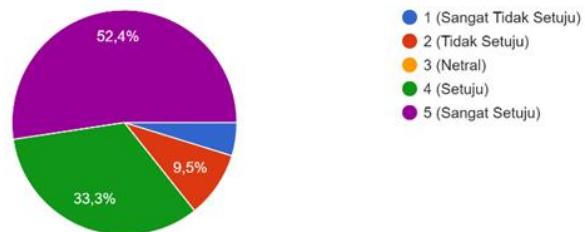
Gambar 3 Persentase Kelayakan Terhadap 11 Akronim Aplikasi Pemerintah

Makna Konotasi yang muncul dari persepsi Masyarakat yang diwakili oleh Responden dari skala 1 - 5 (1 = Sangat Negatif ; 2 = Negatif ; 3 = Netral ;4 = Positif ; 5 = Sangat Positif) berdasarkan pada persentase yang muncul didapatkan data bahwa responden hanya memilih pada Skala 1= sangat negatif yang berjumlah 52.4% dan Skala 2 = Negatif 47.6%. Persentase dapat terlihat pada Gambar 4 di bawah.



Gambar 4 Persentase Makna Konotasi 11 Akronim Aplikasi Pemerintah

Dari data pada Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa 11 Akronim yang digunakan sebagai Aplikasi Pemerintah dinilai memiliki makna konotasi negatif. Secara lebih detail makna konotasi dari 11 Akronim Aplikasi tersebut dinilai mengandung unsur seksualitas terhadap gender tertentu. Sebanyak 52.4% responden menyatakan adanya unsur seksualitas terhadap gender tertentu pada penggunaan Akronim Aplikasi Pemerintah dan hanya 9.5% responden yang menyatakan tidak setuju tentang adanya unsur seksualitas terhadap gender tertentu dalam penggunaan Akronim. Data Persentase dapat terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Persepsi Konotasi Seksualitas pada 11 Akronim Aplikasi Pemerintah

Penggunaan Akronim pada 11 Aplikasi Pemerintah pada kenyataannya memberikan persepsi public yang berbeda. Persepsi ini muncul sebagai bagian dari konotasi yang ditimbulkan dari makna Akronim tersebut. Makna konotatif timbul ketika sebuah kata mengandung nilai rasa, yang bisa bersifat positif atau negatif [13]. Konotasi adalah makna tambahan yang melibatkan nilai rasa yang melekat pada makna dasar kata [14]. Makna konotasi dari penggunaan Akronim tidak dapat dihindari karena konotasi adalah sesuatu yang hanya ada dalam bahasa dan bukan bagian yang mendasar darinya, kita dapat melihat bahwa makna konotatif bukanlah sesuatu yang spesifik dalam bahasa, melainkan berhubungan dengan sistem komunikasi secara umum. Makna

konotasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan makna konseptual. Konotasi cenderung tidak stabil, karena ia sering berubah sesuai dengan budaya, nilai rasa, dan pengalaman individu. Makna konotatif tidak pasti dan terbuka untuk interpretasi, berbeda dengan makna konseptual yang cenderung lebih stabil, meskipun juga dapat berubah [15].

Penggunaan 11 Akronim pada Aplikasi Pemerintah dinilai negatif oleh Masyarakat karena menimbulkan rasa atau asosiasi negatif, juga berlawanan dengan norma Masyarakat yang berlaku [16]. Konotasi negatif dari 11 Akronim Aplikasi Pemerintah secara lebih detail terlihat dari analisis berikut:

Data 1 ‘Si PEPEK’

Memiliki asosiasi negatif hal ini karena dalam KBBI [17] beberapa bahasa daerah dan bahasa slang kata *PEPEK* memiliki makna berbau sensualitas karena merujuk pada organ intim Wanita. Penggunaan akronim ini dapat memperkuat stereotip negatif dan memperburuk persepsi publik terhadap lembaga pemerintah yang menggunakannya. Ini sejalan dengan pemikiran tentang bagaimana bahasa dapat memperkuat dan melanggengkan stereotip gender yang merugikan perempuan [18].

Data 2 ‘SITHOLE’

Memberikan asosiasi negatif karena masyarakat cenderung memolesetkan akronim tersebut dengan ejaan Bahasa Inggris menjadi *SITHOLE* yang merujuk pada makna negatif. Ini menunjukkan dampak bahasa yang bisa menciptakan persepsi buruk dan mempengaruhi citra lembaga pemerintah, bahwa ujaran negatif dapat dianggap sebagai kebiasaan berbahasa yang merugikan [18].

Data 3 ‘SISKA KU INTIP’

Akronim ini diasosiasikan negative karena berbau seksis yakni menggunakan nama Wanita (*SISKA*) dan menggunakan kata *KU INTIP* yang dalam KBBI [17] memiliki makna melihat secara sembunyi-sembunyi. Ini mencerminkan bagaimana bahasa dapat menyindir dan memperkuat stereotip gender, yakni tentang hubungan antara bahasa dan tatanan sosial gender yang merugikan [19].

Data 4 ‘SIMONTOK’

Memiliki makna konotatif yang memiliki asosiasi negatif karena berbau seksis dan vulgar, kata *MONTOK* sendiri berdasarkan KBBI [17] bermakna gemuk, padat, sintal, besar dan berisi (ditujukan untuk buah dada). Ini menunjukkan bagaimana seksisme dapat terwujud dalam bahasa, tentang penguatan stereotip gender melalui bahasa [20].

Data 5 ‘SISEMOK’

Pada penggunaannya Akronim ini memiliki konotasi dengan asosiasi negatif karena kata *SEMOK* berbau seksis, kata tersebut sering diasosiasikan pada bentuk tubuh Wanita terutama bagian pantat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa seksisme dalam bahasa seringkali melanggengkan patriarki dan perbedaan gender [21].

Data 6 ‘ SICANTIK’

Memiliki makna konotasi dengan asosiasi positif karena kata *CANTIK* sendiri di KBBI [17] memiliki makna elok; molek (tentang wajah, muka perempuan). Selain berasosiasi positif kata *SICANTIK* juga berbau seksis karena merujuk pada fisik seorang Wanita. Ini menunjukkan ketegangan antara makna positif dan seksisme dalam Bahasa karena bahasa dapat memperkuat stereotip gender yang merugikan [18].

Data 7 ‘SIGANTENG’

Memiliki makna konotasi dengan asosiasi positif karena kata *GANTENG* sendiri di KBBI[17] memiliki makna elok dan gagah (tentang perawakan dan wajah, khusus untuk laki-laki); tampan. Meskipun berasosiasi positif kata *SIGANTENG* juga berbau seksis karena merujuk pada fisik seorang Laki-laki. Ini menunjukkan bagaimana bahasa dapat menciptakan stereotip gender tentang seksisme halus [21].

Data 8 ‘SIPEDO’

Akronim ini menimbulkan makna konotasi yang negatif dalam masyarakat karena kata *PEDO* umum dipakai sebagai abreviasi dari ‘Pedofil’ yakni pelaku dari sebuah kelainan seksual pada orang dewasa yang menyukai anak-anak di bawah umur. Ini dapat menyebabkan dampak sosial yang serius karena asosiasi negatif yang kuat tentang bagaimana seksisme dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan [18].

Data 9 ‘MAS DEDI MEMANG JANTAN’

Memiliki makna kontotaif yang berbau seksis dan negatif karena menggunakan

kata Jantan yang biasa dipakai untuk menunjukkan kualitas seksual seorang laki-laki. Ini memperkuat pandangan tentang bagaimana seksisme dalam bahasa dapat memperkuat stereotip gender [19].

Data 10 ‘i-Pubers’

Memiliki pelafalan yang mirip dengan Bahasa Inggris yang berarti “saya puber”. Puber sendiri dalam KBBI [17] berarti jenjang usia remaja atau sering dikaitkan dengan masa peralihan dari usia anak ke remaja secara seksualitas tentang penilaian negatif terhadap bahasa yang mengandung unsur seksual [20].

Data 11 ‘JEBOL YA MAS’

Memiliki makna konotatif dengan asosiasi negative karena kata *JEBOL YA MAS* lebih bermakna seksualitas. Penilaian negatif dalam makna Akronim ini menmpatkan wanita diposisi yang lebih rendah daripada laki-laki [22], [23].

Simpulan

Penelitian ini menilai dampak penggunaan akronim dalam aplikasi pemerintah Indonesia, dengan fokus pada konotasi negatif yang dapat memengaruhi persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akronim-akronim yang digunakan sering dianggap vulgar dan seksis oleh masyarakat. Sebagian besar responden menilai bahwa akronim ini tidak layak digunakan karena makna konotatif yang merendahkan, terutama terhadap perempuan. Akronim seperti *SIBEPEK* dan *SIMONTOK* mengandung makna vulgar dan seksis, yang memperkuat stereotip negatif dan dapat menciptakan stigma. Meskipun akronim tersebut mempermudah pengucapan dan memori, konotasi negatifnya dapat merusak citra institusi publik dan menghambat keterlibatan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam branding aplikasi pemerintah harus inklusif dan tidak diskriminatif, mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan sensitif terhadap dampaknya pada persepsi publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya dalam pemilihan nama aplikasi untuk menghindari dampak negatif terhadap citra dan efektivitas layanan publik.

Referensi

- [1] J. Bynner, "Rethinking the Youth Phase of the Life-Course: The Case for Emerging Adulthood?," *J. Youth Stud.*, vol. 8, no. 4, pp. 367-384, 2007, doi: 10.1080/13676260500431628.
- [2] S. Brazys and N. Hardiman, "From Tiger to PIIGS: Ireland and the Use of Heuristics in Comparative Political Economy," *UCD Geary Inst. Discuss. Pap. Ser.*, 2013.
- [3] E. R. Puspapertiwi and I. E. Pratiwi, "Beberapa Aplikasi Pemerintah Bernama 'Nyeleneh', Ahli IT: Tak Sesuai Etika Profesi," Kompas.com. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/10/210000665/beberapa-aplikasi-pemerintah-bernama-nyeleneh-ahli-it-tak-sesuai-etika?page=all>
- [4] M. Altun, "The Power of Language: Exploring its Significance in Shaping Perceptions, Beliefs, and Relationships," *Int. J. Soc. Sci. Educ. Stud.*, vol. 10, no. 3, 2023, doi: 10.23918/ijsses.v10i3p362.
- [5] R. A. Fitrianingsih, F. Amilia, D. F. R. Kamila, and F. P. R. Sari, "Akronim Bahasa Indonesia Di Kalangan Remaja," *J. Pendidik. Bhs.*, vol. 11, no. 2, pp. 40-46, 2023, doi: 10.30659/jpb.11.2.40-46.
- [6] M. A. Griffiths, "Brand Vulgarity," *J. Prod. Brand Manag.*, vol. 27, no. 4, pp. 404-414, 2018, doi: DOI:10.1108/JPBM-01-2017-1385.
- [7] J. Holmes and N. Wilson, *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Routledge, 2017. doi: <https://doi.org/10.4324/9781315833057>.
- [8] E. Kurniawan, O. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- [9] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- [10] E. U. Sutikno *et al.*, "Source and Target Language Oriented on the Bicycle Rider By Tom W. Shapcott on Sapardi Djoko Damono'S Translation (a Case Study)," *Globish An English-Indonesian J. English, Educ. Cult.*, vol. 11, no. 1, p. 57, 2022, doi: 10.31000/globish.v11i1.5556.
- [11] D. Sperber and D. Wilson, *Relevance Communication and Cognition*. Hoboken: Blackwell Publsiher, 1995.
- [12] A. Wicaksono and S. Arimi, "Dominasi Maskulin dalam Akronim Pornografis," *Deskripsi Bhs.*, vol. 3, no. 2, pp. 127-136, 2020, doi: 10.22146/db.v3i2.4087.
- [13] E. Bella Andini and A. Ruhendi Saifullah, "Makna Konotatif Pada Logo 'Nindya Karya' Berbasis Pendekatan Semiotik," in *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS) 2021*, 2021, pp. 11-21. [Online]. Available: <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks>
- [14] Y. C. Sinaga, S. Cyntia, S. Komariah, and F. L. Barus, "Analisis Makna Denotasi dan Konotasi pada Lirik Lagu 'Celengan Rindu' Karya Fiersa Besari," *J. Metabasa*, vol. 2, no. 1, pp. 38-50, 2021, doi: DOI:10.37303/likhitaprajna.v24i1.219.

- [15] I. Mutasim, “Pengamatan atas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Media Pers di Era Kekinian Fokus: Konotasi,” *Likhitaprajna J. Ilm. Fak. Kegur. dan Ilmu Pendidik. Univ. Wisnuwardhana*, vol. 24, no. 1, pp. 51-59, 2022.
- [16] S. Salsabila and D. S. Budi, “Analisis Penggunaan Makna Denotatif dan Makna Konotatif pada Syair Imam Syafi’i,” *Allahjah*, vol. 3, no. 1, pp. 306-321, 2020, doi: <https://doi.org/10.32764/lahjah.v4i1>.
- [17] K. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” [Online]. Available: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- [18] N. L. P. A. Sulatri, “Ujaran Seksisme Yoshiro Mori: Persoalan Stereotip Gender pada Olimpiade Tokyo,” *Kiryoku J. Stud. Kejepangan*, vol. 5, no. 2, pp. 265-271, 2021, doi: 10.14710/kiryoku.v5i2.265-271.
- [19] S. Mills and L. Mullany, *Language, Gender and Feminism: Theory, Methodology and Practice*. London: Routledge, 2011.
- [20] R. Lakoff, *Language and Woman’s Place*, vol. 2, no. 1. Great Britain: Cambridge University Press, 2018. [Online]. Available: <http://www.jstor.org/stable/4166707>
- [21] A. Nalivaike, “The Politics of Gender in Ursula Le Guin’s ‘The Dispossessed,’” *Int. J. Linguist. Lit. Cult.*, vol. 5, no. 1, pp. 16-25, 2018, doi: 10.19044/lle.v5no1a2.
- [22] D. Cameron, *On Language and Sexual Politics*. London: Routledge, 2012. doi: <https://doi.org/10.4324/9780203715369>.
- [23] A. Efendi, “Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan,” *DIKSI*, vol. 14, no. 1, pp. 98-101, 2007.